

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi itu relative cukup tinggi, tetapi tidak diikuti dengan jumlah wajib pajak yang efektif karena peningkatan jumlah wajib pajak yang efektif masih terlalu rendah yaitu hanya meningkat sebesar 900 orang WP saja, dari tahun 2005 sebanyak 13408 meningkat menjadi 14.308 pada tahun 2006. Sedangkan untuk wajib pajak yang terdaftar yang semula hanya berjumlah 38.636 pada tahun 2005, meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 45.354 wp di tahun 2006.
- b. Realisasi penerimaan pajak lebih kecil di bandingkan dengan rencana penerimaan yang telah ditetapkan oleh KPP Bekasi, yaitu untuk tahun anggaran 2005 realisasinya sebesar Rp 1.060.993.000.000, padahal rencana penerimaannya sebesar Rp 1.302.516.000.000, sedangkan untuk tahun anggaran 2006 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 950.867.000.000 padahal rencana penerimaannya sebesar Rp 1.169.117.000.000. Dari data diatas menyimpulkan , bahwa dar' tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 jumlah penerimaan pajak di KPP Bekasi mengalami penurunan dengan persentase sebesar 0,13 % ( dari 81,46 % menjadi 81,33 % )

- c. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPT baik masa maupun tahunan PPh Ps1 25 WP OP, juga mengalami penurunan. Untuk SPT masa turun sebesar 11,12 % yaitu dari 90,62 % pada tahun 2005 kini menjadi 79,50 % pada tahun 2006, hal tersebut juga terjadi pada tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT tahunan juga mengalami penurunan sebesar 12,07 %. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak dan juga kurang adanya tingkat kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.
- d. Peranan STP PPh Ps1 25 WP OP juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 17.347.000.000 turun menjadi Rp 14.285.000.000 pada tahun 2006.
- e. KPP Bekasi telah memberikan pelayanan yang cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi ada satu hal yang kurang yaitu KPP Bekasi kurang memperhatikan sarana pengawasan dan proses administrasinya yang dilakukan terhadap pembayaran PPh pasal 25 WP OP
- f. KPP Bekasi masih menggunakan pencatatan manual dalam penerbitan SPT
- g. Kendala – kendala yang dialami oleh KPP Bekasi antara lain :
- 1) Kurang adanya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak itu sendiri
  - 2) Masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa pajak itu sulit, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan KPP itu sendiri.

- 3) Proses editing dan perekaman SPT masa maupun tahunan tidak seluruhnya terpantau.
- 4) Masih kurangnya tindak lanjut dari pengawasan atas pembayaran PPh pasal 25 WP OP yang dilakukan oleh petugas pajak.

## 5.2 Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengajukan saran – saran sebagai berikut :

- a. KPP Bekasi sebaiknya terus meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi antara petugas pajak ( fiskus ) dengan wajib pajak , yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan pajak, ataupun dengan cara memberikan penyuluhan pajak kepada WP dari rumah ke rumah (door to door).
- b. KPP Bekasi sebaiknya terus melakukan tindakan perbaikan disemua bidang, terutama pada bidang administrasi ( sehingga dapat lebih diintensifkan penagihan pajak kepada WP ) agar tidak terjadi penurunan baik dalam penerimaan pajak maupun penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. KPP Bekasi sebaiknya terus meningkatkan sistem pengawasan atas SPT masa maupun tahunan PPh pasal 25 WP OP melalui proses editing dan perekaman data yang diterima dari wajib pajak , sehingga kegiatan wajib pajak dalam hal penyampaian dan pelaporan SPT masa maupun tahunan dapat terpantau dan diawasi dengan benar.

- d. Jumlah penerbitan SPT sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dan apabila dimungkinkan mencapai 100 % dari seluruh wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dan dapat pula meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- e. Pencatatan manual yang selama ini digunakan dalam penerbitan STP sebaiknya diganti dengan sistem komputerisasi sehingga lebih efisien dan efektif, dan apabila sewaktu – waktu data tersebut dibutuhkan maka mudah dicari dan data tersebut tidak mudah hilang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Handyaningrat, Soewarno, 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supramono, dan Theresia Woro. D, 2005, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: PT. Andi Yogyakarta
- Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia Revisi ke – 6*, Jakarta: Salemba Empat
- Early, Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, Rachmat, 1990, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. ERESKO
- Kotler, Philif, 1999, *Kepatuhan dalam Perpajakan, Jurnal Kilasan Pajak dan Analisis*
- Dokumen – dokumen:
- Keputusan Menteri Keuangan No. 443/ KMK. 01/ 2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak , dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 06/ PJ.9/ 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi pajak

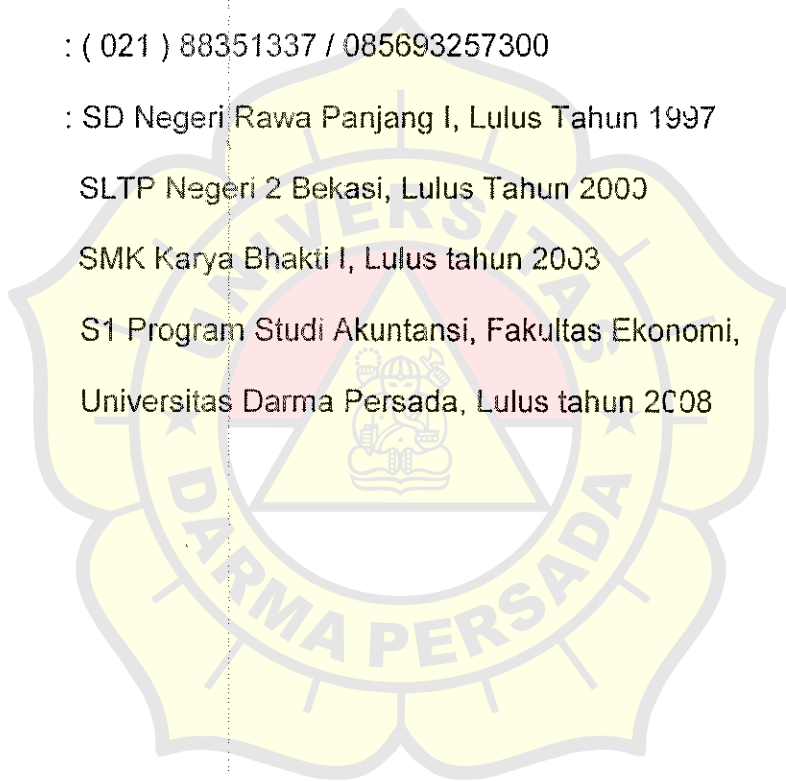
Undang – undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang – Undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Juleha  
Nim : 03420019  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp Bekasi jati, Jln R. A Kartini No. 46 Rt 03/ Rw 26  
Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur  
No.Telp / Hp : ( 021 ) 88351337 / 085693257300  
Pendidikan : SD Negeri Rawa Panjang I, Lulus Tahun 1997  
SLTP Negeri 2 Bekasi, Lulus Tahun 2000  
SMK Karya Bhakti I, Lulus tahun 2003  
S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Darma Persada, Lulus tahun 2008



# Lampiran - Lampiran





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI

Jl. Sersan Aswan 407 – Margahayu, Bekasi 17113

Telp (021) 8809059

Layanan Pengaduan Masyarakat : <http://kontakibb3.pajak.go.id>, e-mail : [kontakibb3@pajak.go.id](mailto:kontakibb3@pajak.go.id)

Call Center/Fax : 021-8866669, SMS Center : 0818-11-JBB3 (0818-11-5223)

Fax (021) 8802525

SURAT KETERANGAN

Nomor: *S-50/WP.22/ep-0101/2007*

Menerangkan bahwa mahasiswa dari Universitas Darna Persada di bawah ini :

Nama : Juleha

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

NIM : 03420019

Telah melaksanakan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, mulai tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 16 Mei 2007 pada seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh OP).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Mei 2007

Korlak Kepegawaian

Farid Baheramsjah

NIP.060048386

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : Juleha  
NIM. : 03420019  
DOSEN PEMBIMBING : Drs. Hartanto, AF, MM.

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	17 des 2007	Revisi bab dan outline.	✓
II	20 des 2007	Bab II, III, IV.	✓
III	7 Jan 2008	Revisi Bab II dan III.	✓
IV	14 Jan 2008	Bab III, IV, dan V.	✓
V	16 Jan 2008	Revisi Bab III, IV, dan V.	✓
VI	16 Jan 2008	Uji diuji dalam hal ini	✓

Tanggal mulai bimbingan : 17 Desember 2007.

Tanggal selesai bimbingan : 16 Januari 2008.

**CATATAN :**

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.



# LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : S-08144/MPJ.22/KP.0104/2007  
 Tanggal : 27 Maret 2007 Jam : 11:40  
 Waktu : 09:25:21.3-407.000  
 N.P.W.P :  
 No. PKP :  
 Ms/Thn pajak : Feb 2007

Nama :  
 Alamat :  
 Jenis Pajak :  
 Tanggal Masuk :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU		Prf/Tg
Uraian		
Surat diterima 1. langsung 2. melalui pos		

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi :	
3. Selesai diproses	

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Dibertahukan kepenuntut umum	
2. Penyidikan	
3. Selesai disidik	
4. Disampaikan kepenuntut umum	
PENETAPAN	
1. STP	
2. SKPN	
3. SKPKB	
4. SKPKBT	
5. SKPLB	
RESTITUSI	
1. SKPKPP	
2. SPMKP	
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas	
2. Diteruskan ke :	
3. Diterima kembali	

SEKSI TERKAIT		Prf/Tg
Uraian		
Diteruskan ke :		
1. Seksi :		
2. Diterima Seksi :		
3. Selesai diproses		
Diteruskan ke :		
1. Seksi :		
2. Diterima Seksi :		
3. Selesai diproses		
Diteruskan ke :		
1. Seksi :		
2. Diterima Seksi :		
3. Selesai diproses		

PENGELOLAAN		Prf/Tg
SPT. Tahunan PPh / masa PPN		
Uraian		
PENGOLAHAN SPI		
1. Dicatat pada IQ - 1		
2. Selesai di-Edit		
3. Selesai direkam		
4. Dicatat pada IQ - 2		
FEMERIKSAAN		
6. Lengkap		
7. Seberapa :		
7.1. Lapangan		
7.2. Kantor		



MEDAN  
SATRIA

KEC. BEKASI UTARA

ENCANA KPP PRATAMA

BEKASI UTARA  
KEC. BEKASI  
BARAT

KEC. BEKASI  
TIMUR

KEC. PONDOK  
GEDE

KEC. BEKASI  
SELATAN

KEC.  
RAWA  
LUMBU

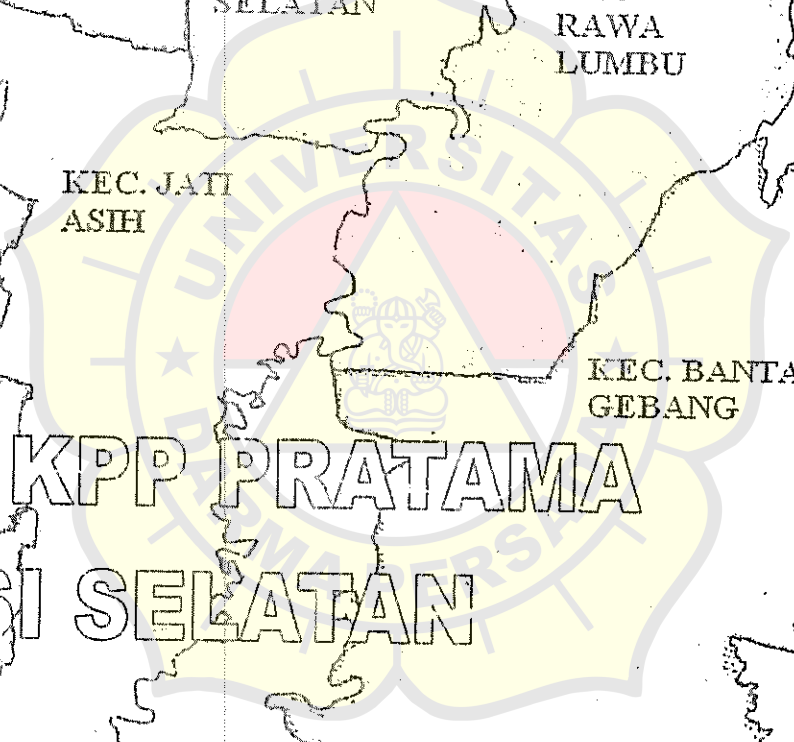
KEC. JATI  
ASIH

KEC. BANTAR  
GEBANG

ENCANA KPP PRATAMA

BEKASI SELATAN

KEC. JATI  
SAMPURNA





**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(SEDERHANA)\***

**FORMULIR**

**1770.S**

**TAHUN PAJAK :**

2	0	0	6
---	---	---	---

- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA " X " DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

**NO. NAS WAJIB PAJAK**

--	--	--	--	--	--	--	--

**NO. NAS WAJIB PAJAK**

.....

**NO. NAS**

.....

**NO. NAS DATA**

ADA, PADA LAMPIRAN TERSENDIRI       TIDAK ADA

		DALAM RUPIAH	DALAM RUPIAH
SILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN		1.
SILAN KENA	2. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK..... <input type="checkbox"/> K..... <input type="checkbox"/> PH..... <input type="checkbox"/> HIB.....	2.	
	3. ZAKAT ATAS PENGHASILAN	3.	
	4. JUMLAH PENGURANGAN (2 + 3)	4.	
	5. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 4)	5.	
	RUTANG	6. PPh TERUTANG	6.
T PAJAK	7. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH	7.	
	8. FISKAL LUAR NEGERI YANG DIBAYAR WAJIB PAJAK	8.	
	9. JUMLAH KREDIT PAJAK (7 + 8)	9.	
RANG / ) DIBAYAR	10. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (6 - 9)	10.	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)		
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA 10 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....			
PHONAN	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 10 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		

ASILAN YANG AKAN PPh DAN AKAN PPh SENDIRI		PENGHASILAN BRUTO (Rp)		PPh TERUTANG (Rp)	
11	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL (LAMPIRAN I)	11a		11b	
12	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh TERSENDIRI (LAMPIRAN II)	12a		12b	
13	JUMLAH (11 + 12)	13a		13b	

ASILAN YANG TERMASUK PPh	14. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PPh (LAMPIRAN III)	14.	
--------------------------	--	-----	--

15	JAH PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK ..... (1+ 13a + 14)	15.	
16	JAH PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK ..... (6 - 13b)	16.	
17	JAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK ..... (Lampiran IV)	17.	
18	JAH KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK ..... (Lampiran V)	18.	

IRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/>
	b. <input type="checkbox"/> Daftar Susunan Keluarga Yang Menjadi Tanggungan Wajib Pajak	e. <input type="checkbox"/>
	c. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29	f. <input type="checkbox"/>

**PERNYATAAN**

DENGAN MENYADAI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR

.....20.....  
(TEMPAT) (TANGGAL)

WAJIB PAJAK       KUASA

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP

NPWP

\*) Formulir ini dipergunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan/atau penghasilan

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI

FORMULIR  
**1770**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK :

BL		TH		BL		TH	
				s.d			

DIANERIKAN  
PAJAK

:

AJAK : .....  
 AT TINGGAL : .....  
 ECAMATAN : .....  
 DS : ..... /       NO. TELP : .....  
 PEKERJAAN BEBAS : ..... KLU       .....  
 A / PEKERJAAN : .....  
 N / FAKS : .....

GHITUNGAN PENGHASILAN NETO :  NORMA  PEMBUKUAN

			(Rupiah)
LAN	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS .. > <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Bagian A Nomor 4 Kolom (3) atau Formulir 1770-I Bagian B Jumlah Kolom (5)]</small>	
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..... > <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Bagian C Jumlah Kolom (5)]</small>	
	3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ..... > <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Bagian D Jumlah Kolom (5)]</small>	
	4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ..... > <small>[Diisi dari Formulir 1770 - II Bagian B Jumlah Kolom (4)]</small>	
	5	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 sampai dengan 4) ..... >	
LAN AK	6	ZAKAT ATAS PENGHASILAN ..... >	
	7	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6) ..... >	
	8	KOMPENSASI KERUGIAN ..... >	
	9	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8) ..... >	
	10	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / ..... <input type="checkbox"/> K / ..... <input type="checkbox"/> K / I / ..... <input type="checkbox"/> PH / ..... <input type="checkbox"/> HB / ..... >	
	11	PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10) ..... >	
ANG	12	PPh TERUTANG (Tarif Pph Pasal 17 UU Pph X Huruf C Angka 11) ..... >	
	13	PENGEMBALIAN / PENCURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ..... >	
	14	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (12 + 13) ..... >	
JAK	15	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI ..... > <small>(Diisi dari Formulir 1770- II Bagian A dan Bagian B)</small>	
	16	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ..... (14 - 15) ..... >	
	b.	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	17	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a.	PR. PASAL 25 BULANAN ..... >	
b.	PPh PASAL 25 AYAT (7) ..... >		
c.	STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak) ..... >		

**G / YAR**

18. a.  PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pasal 29) .....> (16 - 17) .....>

b.  PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pasal 28A) .....

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 18 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

**NAN**

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 18 b MOHON :

DIRESTITUSIKAN

DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK

**PPh AHUN**

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR .....>

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :

a.  1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 a.

b.  PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

AN NA- VAL, AN A DAN N AK.	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PAJAK (Rupiah)
	(1)	(2)
1. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI .....> [Diisi dari Formulir 1770-III Jumlah Bagian A I dan II Kolom (4)]		
2. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU .....> [Diisi dari Formulir 1770-III Bagian A III Kolom (3) dan (4)]		
3. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....> [Diisi dari Formulir 1770-III Jumlah Bagian B Kolom (3)]		

**PAJAK LAN**

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN .....> [Jumlah dari Huruf D Angka 14 + Huruf I Angka 1 Kolom (2) + Huruf I Angka 2 Kolom (2)]

**NAN**

1. JUMLAH HARTA [ Diisi dari Formulir 1770-IV Bagian A Jumlah Kolom (4) ] .....> Rp.....>

2. JUMLAH KEWAJIBAN [Diisi dari Formulir 1770-IV Bagian B Jumlah Kolom (4) ] .....> Rp.....>

SELAIN FORMULIR 1770 - I S.D. 1770 - IV BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a.  SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

b.  SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

c.  NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI ATAU REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO (Coret yang tidak perlu)

d.  PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

e.  FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN ATAU 1721-A2 (..... Lembar)

f.  BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI

g.  PENGHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA

h.  PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

i.  DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK

j.  DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (Khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu)

k.  FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)

l.  .....

**NAN**

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.

.....> (tempat) (tanggal)

WAJIB PAJAK TANDA TANGAN : .....

KUASA NAMA LENGKAP : .....

**PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS  
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

IS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(2)	(3)	(4)	(5)
IG TRI  IAAN BEBAS LAINNYA			
SH			

**: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(2)	(3)	(4)	(5)
SH			

**: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**  
(Tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat Final)

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(2)	(3)	(4)	(5)
N TI  ARGAAAN DAN HADIAH UNGAN DARI PENJUALAN / LIHAN HARTA ASILAN LAINNYA			
SH			

mlah Bagian B kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 1.  
 mlah Bagian C kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 2.  
 mlah Bagian D kolom (5) ke Formulir 1770 huruf B angka 3.  
 ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

LAMPIRAN - I  
**SPT TAHUNAN  
 PAJAK PENGHASILAN  
 WP ORANG PRIBADI**

HALAMAN I

FORMULIR

**1770 - I**

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK :

BL.	TH.	s.d	BL.	TH.

ANGKAS  
 RAJ PAJAK

P B PAJAK :

**PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS  
 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN**

/ LAPORAN KEUANGAN :  DIAUDIT  TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

ANTOR AKUNTAN PUBLIK :

ANTOR KONSULTAN PAJAK :

URAIAN (2)	(Rupiah) (3)
<b>ASILAN DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>SIAL :</b>	
ADARAN USAHA .....	Y
GA POKOK PENJUALAN .....	Y
AV / RUGI BRUTO USAHA (a-b) .....	Y
A USAHA .....	Y
PHASILAN NETO DARI USAHA (c - d) .....	Y
<b>UALIAN FISKAL POSITIF :</b>	
A YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU IG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA .....	Y
II ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK .....	Y
GANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN M BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN .....	Y
AH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI NGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN .....	Y
A YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	Y
C PENGHASILAN .....	Y
ANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK .....	Y
SI ADMINISTRASI .....	Y
H PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL .....	Y
UNTUK MENDAPKANT, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....	Y
SUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	Y
JUMLAH (a sampai dengan k) .....	Y
<b>AIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
IASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK TETAPI TERMASUK DALAM FEREDARAN USAHA .....	Y
H PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL .....	Y
SUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	Y
JUMLAH (a sampai dengan c) .....	Y
<b>ILAN NETO DALAM NEGERI SETELAH PENYESUAIAN FISKAL (1e + 2 - 3) .....</b>	Y

in jumlah nomor 4 kolom (3) ke Formulir 1770 huruf D angka 1

**Bagian I : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final**

Sumber/Jenis Penghasilan	Penghasilan Bruto	PPh Terutang
Gedug Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI		
Gedug/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek		
Dividendo Saham di Bursa Efek		
Hadiah Undian		
Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus		
Pajak Penghasilan atas Beban APBN/APBD		
Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan atau Bangunan		
Pajak Penghasilan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah		
Pajak Penghasilan atas Tanah dan atau Bangunan		
Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Bersifat Final		
Jumlah		

**Bagian II : Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tersendiri**

Sumber/Jenis Penghasilan	Penghasilan Bruto	PPh Terutang
Penghasilan Istri Dari Satu Pemberi Kerja		
Penghasilan Anak Dari Pekerjaan		
Jumlah		

**Bagian III : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek PPh**

Sumber/Jenis Penghasilan	Penghasilan Bruto
Warisan, Sumbangan/Hibah	
Dividendo	
Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
Uang Pertanggungan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
Jumlah	

**Bagian IV : Daftar Harta**

Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
Jumlah			

Nama dan Alamat Per pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah	Keterangan
Jumlah			

*Jika Formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.*



# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI

FORMULIR

1770 - III

TAHUN PAJAK :

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU SERTA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BL                      T.i                      BL                      TH  
  s.d

:

B PAJAK :

**: PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU**

SUMBER / JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)	PPh TERUTANG (Rupiah) (4)
<b>KAN PAJAK BERSIFAT FINAL :</b>		
SA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI		
SA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN MAGANGANNYA DI BURSA EFEK		
AN SAHAM DI BURSA EFEK		
AH UNDIAN		
NGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN IUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
DRARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
ALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU BANGUNAN		
UNAN YANG DITERIMA DALAM KA BANGUN GUNA SERAH ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
USA KONSTRUKSI		
ILAN USAHA :		
ALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM MINA		
LUR / DISTRIBUTOR ROKOK.		
ILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL		
AN PAJAK TERSENDIRI :		
ILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
ILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
<b>JUMLAH</b>		
ILAN PENGUSAHA TERTENTU		

## PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

SUMBER / JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
1 / SUMBANGAN / HIBAH	
ABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, TUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
URANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
ILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
<b>JUMLAH</b>	

Isilah Bagian A I dan II kolom (4) ke Formulir 1770 huruf I angka I kolom (2)  
Isilah Bagian A III ke Formulir 1770 huruf I angka I kolom (2)



